



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 31-50

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Nur Aqilah Binti Khairifaizul, Zulfahmi Bustami, Wahidin: Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh (Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

ALASAN PENGABAIAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM PUTUSAN FSAKH

(Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Negeri Perak
Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

Nur Aqilah Binti Khairifaizul¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: nuraqilahkf@gmail.com

Zulfahmi Bustami²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: bnzulfahmi@gmail.com

Wahidin³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: wahidin@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri semasa pernikahan di mana terjadi juga perbedaan panduan pelaksanaan tersebut di kalangan orang-orang yang terlibat sehingga tidak terjadi yurifikasi hukum, penyatuan hukum, ketertiban hukum serta keadilan hukum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menyelesaikan fasakh dalam pengabaian nafkah istri, bagaimana panduan pelaksanaannya dan analisa putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar dalam menyelesaikan kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan membuat perbedaan putusan antara Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dengan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Populasi adalah pemberi nafkah istri mengikut data kasus yang terjadi setiap tahun, sedangkan sampel diambil sebanyak 3 kasus di negeri Perak dan 3 kasus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif sedangkan metode penulisan adalah metode deskriptif analisis, deduktif dan induktif. Hasil analisis menunjukkan putusan dari pertimbangan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak menjadikan

pembuktian, afidavit penyampaian, tempoh perbicaraan, pembelaan, keperluan dan kemampuan, ayat al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh serta kadar nafkah istri sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan fasakh dikeluarkan bagi keputusan pengabaian nafkah istri.

Kata kunci : Fasakh, Pengabaian Nafkah, Studi Perbandingan

Abstract

This research was motivated by differences in decisions between the Lower Syariah Court of Seri Iskandar, Perak State and the Lower Syariah Court of the Federal Territory of Kuala Lumpur regarding the case of fasakh in neglecting a wife's support during marriage where there were also differences in implementation guidelines among the people involved so that it was not legal legalization, legal unification, legal order and legal justice occur. The problem formulation in the research is how the decisions and considerations of the judges of the Lower Syariah Court of Seri Iskandar, Perak State and the Lower Syariah Court of the Federal Territory of Kuala Lumpur in resolving fasakh in neglecting a wife's maintenance, what is the implementation guide and analysis of the judge's decision between the Seri Iskandar Lower Syariah Court in resolving the fasakh case of neglect of the wife's maintenance. This research is field research. This research uses a comparative approach by making differences in decisions between the Seri Iskandar Syariah Court, Perak State and the Kuala Lumpur Federal Territory Syariah Court. The population is the wife's breadwinner according to data on cases that occur every year, while the sample was taken as 3 cases in the country of Perak and 3 cases in the Federal Territory of Kuala Lumpur. Data collection techniques are observation, interviews, literature study and documentation. Analysis of the data obtained was carried out using qualitative analysis while the writing method was descriptive analysis, deductive and inductive methods. The results of the analysis show that the decision from the Seri Iskandar Lower Syariah Court, Perak State considers evidence, submission of affidavits, trial period, defense, needs and capabilities, Al-Qur'an verses, hadith, fiqh rules and the level of the wife's maintenance as consideration before a fasakh decision is issued for the decision to ignore the wife's maintenance

Keywords: Fasakh, Abandonment of Livelihoods, Study Comparative

PENDAHULUAN

Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah iaitu pembatalan pernikahan oleh istri karena antara suami istri tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.¹ Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad² dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang

¹ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 195

² SA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, "Hukum Pernikahan Islam", (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 271

kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.³ Ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan dapat dirusak atau difasakh, dengan fasakh tersebut akad pernikahannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain adalah adanya cacat pada salah satu pihak dari suami istri.⁴

Rasulullah SAW bersabda:

عن كعب بن زيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه ووقع على الفراش أبصر بكسحها بياضا فأتاز عن الفراش ثم قال : خذى عليك ثيابك ولم يأخذها مما اتاها شيئا . (رواه احمد والبيهقي)

Artinya: “Dari Ka’ab bin Zaid r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar, tatkala Rasulullah masuk kepadanya dan meletakkan pakainnya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (sopak) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata, “Pakailah pakaian engkau,” Rasulullah tidak mengambil daripadanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan kepadanya, (H.R Al Hakim).⁵

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis pernikahan yang berujung pada perceraian. Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan: Pada menentukan jumlah apa-apa nafkah yang hendak dibayar, mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.⁶ Disebabkan peruntukan yang umum, para hakim meneliti berbagai faktor untuk menetapkan kadar nafkah anak yang menepati kifayah dan ma’ruf. Ini seringkali membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain, seiring bertambahnya pengalaman dan pengamatan hakim-hakim.⁷ Perbedaan pendekatan hakim-hakim dalam menentukan kadar nafkah yang munasabah ini dapat kita lihat dalam putusan hakim di Mahkamah Syariah. Eksistensi putusan hakim sangat diperlukan karena merupakan sebagian dari pada proses perbicaraan di mahkamah syariah sama ada dalam kasus mal maupun jenayah. Ia sangat penting bagi mendapat sesuatu keputusan yang tepat dan adil bagi semua pihak karena Islam sangat mengambil berat

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 1, cet. ke-1, h. 317

⁴ SA. Al-Hamdani, *Op.Cit*, h. 273

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 214.

⁶ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019) (Selangor: Golden Books Centre, 2019), h.53

⁷ Bahiyah Ahmad, Raihanah Azahari dan Asmak Ab Rahman, “Kriteria Kifayah Dan Ma’Ruf Nafkah Istri Dan Anak: Kajian Pelaksanaan Semasa Di Malaysia,” *Jurnal Syariah*, Jil.21, Bil. 3, 2013, h.313

dan menuntut umatnya berlaku adil, keadilan dalam pemerintahan dan juga dalam penghakiman.⁸ Firman Allah S.W.T dalam Ayat Surah An-Nisa, ayat 58:

Maksudnya : “Apabila kamu menghakimi antara manusia hendaklah kamu menghukum dengan seadil-adilnya.”⁹

Apabila Putusan Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan dalam Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998 menjelaskan mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya.¹⁰ Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Sedangkan menurut pandangan para ulama, nafkah ini adalah pengeluaran seseorang sebagai nafkah kepada mereka yang menjadi tanggungannya, seperti biaya untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya yang terikat dengannya. Adapun hukum nafkah yang disandarkan kepada seseorang adalah wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian, nafkah wajib diberikan oleh suami, atau ayah atau majikan.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya ramah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.¹² Allah S.W.T berfirman dalam Ayat Surah Al-Baqarah, ayat 233 :

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya.¹³

Di dalam hadits yang lain pula, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mulailah memberi (nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku”,

⁸ Dato' Haji Daud Bin Muhammad (Dato' Aria DiRaja) Ketua Hakim Syarie Kelantan, “ Penulisan Alasan Penghakiman” <http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/downloadjksnk/Alasanpenghakiman.pdf>, diakses pada 23 November 2022 jam 20:12 WIB.

⁹ Grup Buku Karangraf, Alquran Dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Selangor: Karya Bestari, 2014) h.87.

¹⁰ Portal Rasmi E-Syariah, Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Bahagian XVII – Pendengaran”

¹¹ Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 4 Mazhab Juzuk 4,5* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2017), h.440.

¹² Mahkamah Agung-RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) h.84.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Offset, 2011), h.72

(HR.Bukhari).¹⁴ Jelas diperintahkan kepada kaum laki-laki untuk menafkahi istrinya, anaknya dan siapa sahaja yang berhak mendapatkannya dari dirinya.

Mengikuti Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004 di dalam Seksyen 53 yaitu:

Pasal 1, Seseorang perempuan atau laki-laki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:

1. Bahwa tempat di mana beradanya suami atau istri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
2. Bahwa suami telah cuai atau istri telah tidak cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
3. Bahawa suami atau istri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah menurut Hukum Syarak, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

Penelitian ini juga bertuju kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984 di dalam Seksyen 52 yaitu¹⁵ :

- a. Seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syara' adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan peerkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:
 - 1) Bahwa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.
 - 2) Bahwa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan
 - 3) Bahawa suami telah tidak menunaikan , tanpa sebab yang munasabah, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
 - 4) Bahwa suami menganiayainya, yaitu antara lain;
- b. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.¹⁶

Dalam observasi awal, peneliti melihat adanya fenomena dan Dalam observasi awal, peneliti melihat adanya fenomena dan kasus-kasus fasakh pengabaian nafkah istri ini ialah apabila satu kasus berlaku kepada pasangan suami istri yang telah mengalami masalah rumah tangga. Hasil pernikahan, suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah kepada istri. Penggugat atau disebut mantan istritelah membuat tuntutan fasakh seperti mengabai atau cuai tidak ada peruntukkan oleh tergugat yaitu mantan

¹⁴ Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, "Bab Kewajiban Nafkah ke atas keluarga dan Kanak-kanak", https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=9778&idto=9780&bk_no=52&ID=2987, diakses pada 25 November 2022 jam 21:34 WIB.

¹⁵ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)* (Selangor : Golden Books Centre, 2019), h.57.

¹⁶ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)*, h.57

suaminya di Mahkamah Syariah di Malaysia atau disebut Pengadilan Agama. Dalam pernyataan tuntutan Penggugat, Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah terhadap istri semasa pernikahan. Setelah kasus diajukan, mahkamah yaitu hakim akan memeriksa dan menilai semua bukti dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dengan bukti-bukti dari Tergugat mengenai bukti kesanggupan dan beban tanggung jawab Tergugat, kemudian setelah itu barulah digunakan menggunakan putusan hakim mengikut Akta atau Enakmen sesuatu negeri bersangkutan kasus itu. Putusan hakim ini juga sering berbeda dalam setiap kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri. Kasus-kasus di mahkamah syariah akan dijadikan penelitian, sejauhmana kasus-kasus ini dapat diselesaikan dengan muju kepada hukum-hukum yang berkenaan dengan fasakh pengabaian nafkah istri.

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus yang dapat saya ambil di Mahkamah Seri Iskandar Negeri Perak.

- a. Kasus pertama di Perak, pada tahun 2021, seorang perempuan yang berstatus istri yang bernama Azura Binti Razaman telah membuat tuntutan fasakh istri bahwa suami telah gagal memberikan nafkah. Selain itu, suami juga kurang memberi perhatian sepenuhnya dan tidak tinggal bersama sekitar hampir duan tahun. Suaminya seorang penagih dada dan disebabkan itu suaminya berubah tidak mahu mengauli dan bermesra dengan istri.suaminya hendaklah tidak mengabaikan dan tidak cuai dalam memperuntukkan nafkah sebulan atau mengikut kemampuan suami oleh Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar.

Beberapa kasus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yaitu:

- a. Kasus pertama yang terjadi adalah seorang wanita yang bernama Syaira Dalina Abdullah telah membuat tuntutan berkaitan hak untuk mendapatkan perintah pembubaran pernikahan atau fasakh karena suami telah cuai dan tidak mengadakan peruntukan nafkah diri selama tiga bulan, sejak tahun 2008 sehingga difailkan. Seterusnya suami telah berterusan meninggalkan sitri semenjak awal tahun 2008 sehingga Agustus. Suaminya hendaklah membuat pembelaan sekiranya istri membuat tuntutan adalah tidak benar, mahkamah juga mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi da juga sumpah Istizhar oleh Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Dari fenomena ini, terlihat bahwa keputusan hakim berbeda di setiap kasus sementara ketetapan antara enakmen dan akta dengan keputusan hakim, berbeda. Maka penulis tertarik untuk meneliti kenapa hakim memberi keputusan yang berbeda di setiap kasus yang dikendalikan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Subjek dalam penelitian ini adalah putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sedangkan objek penelitian ini adalah menurut Enakmen Keluarga Islam di Negeri Perak dan Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

1. Data Primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁷
2. Data Sekunder, yaitu bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah penerima fasakh mengikut data kasus yang terjadi setiap tahun di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dalam Menyelesaikan Kasus Pengabaian Nafkah Istri.

- a. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak

Hal ini juga berdasarkan wawancara¹⁹ penulis dengan Tuan Mohd Azlan Bin Mohd Azhar yang merupakan Ketua Hakim Syarie di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak menjelaskan tentang pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan putusan dan setiap keputusan haruslah merujuk kepada Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dan Enakmen Tatacara Mal Perak 2004. Jika menurut Enakmen yang telah ditetapkan yaitu:²⁰

Pasal 1, Seseorang perempuan atau laki-laki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu :

¹⁷ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1, h.57.

¹⁸ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009), h.94.

¹⁹ Tuan Mohd Azlan Bin Mohd Azhar, Ketua Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, *Wawancara*, 8 Februari 2023

²⁰ Enakmen Keluarga Islam Perak 2004, Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, *Portal E-Syariah*, 2004

- 1) Bahwa tempat di mana beradanya suami atau istri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
- 2) Bahwa suami telah cuai atau istri telah tidak cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
- 3) Bahwa suami atau istri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah menurut Hukum Syarak, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai masalah ini sebagai contoh, penulis bawakan beberapa kasus yang penulis dapatkan daripada Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak.

1) Kasus dengan nomor daftar bilangan 014/0018/2022²¹

Nama Penggugat: Palilah Binti Lee

Tanggal: Kasus ini difailkan pada 03.11.2022 oleh Penggugat

Nama Tergugat: Mahad Bin Daud

Tuntutan: Berdasarkan tuntutan Penggugat, beliau telah membuat tuntutan untuk mengubah perintah bagi Fasakh bahwa Tergugat menganiaya penggugat dalam perkahwinan dengan melakukan bahwa Tergugat telah cuai tidak mengadakan peruntukan nafkah selama tempoh tiga bulan. Peruntukan nafkah tidak diberi sejak Februari 2019 hingga Oktober 2022 lebih 4 tahun. Tergugat keluar dari rumah bertanggal 04 Januari 2018 sehingga kini.

Keputusan: Berdasarkan perkara tuntutan Penggugat berkenaan kejadian itu, mahkamah melihat penggugat tidak ada pembuktian-pembuktian yang mengatakan Tergugat seperti itu. Maka mahkamah menyuruh penggugat untuk membawa beberapa saksi untuk mengukuhkan lagi tuntutan tersebut. Selain itu, Penggugat harus membuat penghujahan bertulis. Penggugat seorang yang tidak bekerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Selayaknya nafkah itu dilihat sebagai penyambung hayat dan bukan bermewah-mewah. Belanja yang sewajarnya disediakan oleh suami adalah makan minum, segala biaya bil-bil rumah dan nafkah batin. Mahkamah Yang Mulia ini melihat sepertimana penggugat membawa pembuktian-pembuktian seperti jiran terdekat, keluarga atau ahli yang terdekat yang melihat kejadian itu. Di sinilah perician tentang perkara adakah penggugat hanya mereka-reka cerita yang diambilkira oleh Mahkamah. Jadi Tergugat hendaklah membayar nafkah sebulan sekali dengan sekadarnya dan tidak lari begitu sahaja dalam mengabaikan nafkah tersebut. Tergugat hendaklah berbincang dengan sebaik-baiknya tentang nafkah kepada penggugat. Tergugat hendaklah bertanggungjawab sebagai suami untuk tidak mengabaikan sebarang nafkah zahir dan batin.

²¹ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, Kasus No. 014-0018-2022

Pertimbangan: Hakim melihat kepada perkara pembuktian dan kehadiran Tergugat sebanyak tiga kali tidak hadir. Justeru itu, peruntukan ini juga jelas menyatakan kewajipan suami menyediakan keperluan nafkah istri yaitu makanan, pakaian, perubatan, kewangan dan tempat tinggal termasuk juga keperluan-keperluan lain agar istri ini tidak terganggu kehidupan rumah tangganya. Tanggung jawab seorang suami tidak akan terhenti dengan sendirinya melainkan dan sehingga si suami jatuh miskin serta tidak mampu mencari nafkah disebabkan kecacatan fizikal dan mental. Setelah mahkamah berpuas hati dengan keterangan Penggugat, keterangan dua orang saksi Penggugat serta dokumen-dokumen dan kertas kausa yang telah difailkan oleh pihak-pihak ke mahkamah. Setelah mahkamah mengambil kira sumpah yang telah dibuat oleh pihak Penggugat. Seterusnya, mahkamah merujuk kepada undang-undang bertulis yang berkenaan dan melihat kepada hukum syarak dan mahkamah mensabitkan Tergugat telah tidak mengadakan peruntukan nafkah selama tempoh melebihi tiga bulan kepada Penggugat sejak Februari 2018 sehingga Oktober 2022. Mahkamah memerintahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dibubarkan dan difasakhkan mulai 03 Februari 2022 waktu 10.00 pagi dan penggugat beriddah tempoh tiga kali suci. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 53 (1) (b) Enakmen Keluarga Islam (PERAK) 2004.

2) Kasus dengan nomor daftar bilangan 014/0339/2021²²

Nama Penggugat: Azura Binti Razaman

Tanggal: Kasus ini difailkan pada 13 Oktober 2021 oleh Penggugat

Nama Tergugat: Ahmad Nizam Bin Abdul Rani

Tuntutan: Berdasarkan tuntutan Penggugat, beliau telah membuat tuntutan Nafkah Istri bahwa Tergugat telah gagal memberikan nafkah. Selain itu, Tergugat juga kurang memberi perhatian sepenuhnya dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat sekitar hampir dua bulan. Tergugat seorang penagih dadah dan disebabkan itu beliau berubah tidak mahu bergaul dan bermesra bersama dengan Penggugat.

Keputusan: Mahkamah meminta membuat tuntutan ini haruslah kukuh dengan mendatang dua orang saksi laki-laki. Sekiranya Penggugat tidak membawa pembuktian-pembuktian tidak kukuh, pembuktian lain juga dibuat seperti penghujahan bertulis oleh Penggugat itu sendiri. Tergugat bukan dari kalangan orang yang berkedudukan serta taraf tinggi. Selayaknya nafkah itu dilihat sebagai penyambung perbelanjaan bulanan Penggugat dan bukan untuk bermewah-mewah. Tergugat telah tidak tinggal bersama selama dua bulan dan

²² Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, Kasus No. 014-0339-2021

tidak mahu bergauli bersama Penggugat. Tergugat juga adalah seorang penagih dadah. Tergugat haruslah hadir ke mahkamah membuat pembelaan sekiranya tuntutan terhadap Penggugat ini adalah tidak benar. Disinilah perbezaan perisian tentang perkara bahwa telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan diambil kira oleh Mahkamah Yang Mulia ini. Selain itu juga, bahwa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun. Mahkamah Yang Mulia juga melihat sekiranya Tergugat gagal hadir juga pada tanggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah, maka akan dating prosiding kasus ini akan diteruskan dengan bicara berhadapan dengan Hakim. Jadi, Tergugat hendaklah memberikan nafkah mengikut kemampuan Tergugat itu sendiri. Tergugat hendaklah membuat bayaran nafkah Istri tersebut setiap bulan mengikut kadarnya. Tergugat juga hendaklah tinggal serumah bersama istri dan melayani dengan baik terhadap istri. Tergugat juga hendaklah berhenti mengambil pengambilan dadah karena membahaya diri Tergugat agar rumah tangga selepas ini lebih aman dan sentosa.

Pertimbangan: Hakim merujuk undang-undang bertulis yang berkaitan dan melihat kepada hukum syarak. Mengikut Seksyen 53 (1) (b) Enakmen Keluarga Islam Perak 2004, bahwa Tergugat telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan terhadap Istri, sebagai suami, Allah SWT telah berfirman dalam Surat at-Talaq, Ayat 7:

Maksudnya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberati seorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. (Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahwa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan". Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mampu mestilah memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya berdasarkan kemampuan dan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Berdasarkan seksyen 53 ini, kewajipan suami menyediakan keperluan dan kebutuhan nafkah istri yaitu makanan, pakaian, perubatan dan tempat tinggal adalah agar tidak berlaku krisis dalam perkahwinan yang berujung pada perceraian. Justeru itu, ayat Al-Qur'an Surat At-Thalak di atas pada ayat 7 menggariskan bahwa orang yang mampu mestilah memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya.

3) Kasus dengan nomor daftar bilangan 014/0382/2021²³

Nama Penggugat: Nor Hayati Binti Abu Daud

²³ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, Kasus No. 014-0382-2021

Tanggal: Kasus ini difailkan pada oleh Penggugat 11 Novemver 2021

Nama Tergugat: Muhammad Solihin Bin Daud

Tuntutan: Berdasarkan tuntutan Penggugat, beliau memohon fasakh bahwa suami telah cuai dan gagal dalam menyediakan nafkah zahir melebihi tempoh dua bulan dan telah menganiayai istri dengan lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan istri menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.

Keputusan: Tuntutan Penggugat berkenaan bahwa Tergugat telah cuai dan menganiaya Penggugat, Mahkamah mengarahkan Penggugat membuat teliti dokumentasi dan mendatangkan saksi dua orang laki-laki. Ianya sebagai melihat kepada Tergugat yang menyakiti kehidupan Penggugat. Penggugat bukan dari kalangan keluarga orang berkedudukan serta bertaraf tinggi. Selayaknya nafkah itu dilihat sebagai penyambung hayat dan bukan bermewah-mewah tapi mampu untuk keperluan Penggugat itu sendiri di dalam kehidupan seharian. Dari sisi fizikal, Deefendan kerap memukul Penggugat dengan menggunakan objek lain dan anggota badan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga kerap memberikan kata-kata makian kepada Penggugat pada setiap hari seperti betina, babi, anak haram dan sebagainya. Mahkamah Yang Mulia ini melihat sepertimana dinyatakan tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan. Mahkamah meneruskan prosiding ke peringkat perbicaraan sekiranya suami tidak hadir dan tiada membuat pembelaan. Di sinilah berlakunya perincian tentang perkara tentang kecuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkah istri yang diambilkira oleh Mahkamah Yang Mulia. Jadi, Tergugat hendaklah membayar Nafkah Istri pada atau sebelum tanggal prosiding perbicaraan yang terakhir. Tergugat hendaklah membuat pembelaan sekiranya tuntutan Penggugat ini adalah tidak benar. Tergugat hendaklah tidak memaki dan tidak mengeluarkan kata-kata kasusat terhadap Penggugat.

Pertimbangan: Hakim melihat kepada kehadiran Tergugat ke mahkamah untuk sebarang pembelaan. Selain itu, hakim juga melihat keterangan dua orang saksi yang mewakili tuntutan Penggugat dan pembuktian-pembuktian bertulis itu sendiri. Hakim mendapati Tergugat tidak membuat pembelaan yang mengatakan tidak membuat sedemikian. Mengikut Seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Perak 2004, mahkamah disabitkan Tergugat telah cuai dan telah tidak mengadakan peruntukan nafkah istri selama tempoh melebihi tiga bulan kepada Penggugat sejak Disember 2018 sehingga Juli 2022. Mahkamah memerintahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dibubarkan dan difasakhkan mulai 18 Agustus 2022 dan Penggugat hendaklah beriidah selama tempoh tiga kali suci mulai tanggal tersebut. Individu utama yang bertanggung

jawab untuk menanggung dan memberikan Nafkah terhadap Istri adalah Suami. Tanggung jawab ini tidak dikongsi dengan orang lain sepertimana disandarkan kepada ayat 233, Surat al-Baqarah dan Hadits Rasulullah S.A.W berkaitan kisah Hindun, Istri Abu Sufyan. Peruntukkan ini dapat difahami bahwa perkataan laki-laki dalam klausa yang disebut tidak membawa maksud lain selain suami karena tercatat perkataan “istri”. Suami tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasusat kepada istri, Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nisa, Ayat 148:

Maksudnya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan melontarkan kata-kata buruk kepada sesama manusia, termasuk terhadap istri atau suami. Apabila hal ini dilakukan berlarut-larut maka akan terjadi permusuhan atau kebencian, bahkan memengaruhi orang yang mendengarnya apabila perbuatan ini dilakukan oleh seorang suami.

b. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hal ini juga berdasarkan wawancara²⁴ penulis dengan Tuan Azharizal Bin Arshad yang merupakan Pegawai Penyelidikan Kanan Ketua Hakim Syarie di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjelaskan tentang pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan putusan dan setiap keputusan haruslah merujuk kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.²⁵

Menurut Akta yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syara' adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:
 - a) Bahwa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.
 - b) Bahwa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan
 - c) Bahwa suami telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

²⁴ Tuan Azharizal Bin Arshad, Pegawai Penyelidikan Kanan Ketua Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, *Wawancara*, 15 Februari 2023.

²⁵ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*, (Akta 303 Hingga 22hb Oktober 1998) (Selangor: Golden Books Centre, 2019), h.54

d) Bahwa suami menganiayainya, yaitu antara lain;

Tinjauan dan pelitian penulis mengenai pertimbangan pelaksanaan putusan hakim dalam penghakiman bagi kedua-dua negeri ini adalah, bagi Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak, pertimbangan pelaksanaannya adalah melihat kemampuan suami dalam tempoh perkahwinan serta mengikut kepada budi bicara hakim. Biasanya, hakim melihat keperluan istri yaitu perbelanjaannya berapa sebulan dan lain-lain yang berkaitan. Keperluan ini ada tiga perkara tetapi hakim melihat juga yang lain yaitu makan minum, tempat tinggal, kasehatan perbelanjaan bulanan dan pakaian. Kebiasaannya juga adalah hakim melihat dan mengambil kira pada status dan situasi suami ini sama ada orang kaya, sederhana ataupun miskin. Keperluan itu melihat pada status keluarga itu. Jika suami itu adalah orang kaya, cara pemberian nafkah juga adalah cara orang kaya, jika sederhana, caranya sederhana begitu juga jika miskin. Seterusnya, hakim juga melihat keberadaan suami yang tidak duduk bersama lebih satu tahun. Jika disebabkan istri nusyuz atau suami itu yang keluar atas sebab diri sendiri yang culas tidak mengambil tahu tentang istri. Hakim juga melihat suami bekerjasama ya atau tidak hadir ke mahkamah untuk bicara.²⁶

Bagi Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula, sebelum hakim mengeluarkan putusan, hakim menilai setiap kasus melalui proses perbincangan. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Tuan Hakim²⁷, beliau menjelaskan terlebih dahulu proses-proses awal untuk fasakh ini. Proses awalnya adalah Tuntutan, Pliding, Interlokutori/Permohonan sampingan, keterangan penggugat, keterangan saksi-saksi penggugat, keterangan Pra Bicara, Bicara, Hujahan, dan Keputusan Penghakiman. Dari penyata tuntutan, ada pembelaan dan jawapan pada pembelaan tersebut. Pembelaan ini ada yang dia setuju pada tuntutan itu dan ada yang tidak setuju dalam pembelaan tersebut. Jawapan pada pembelaan itu sama juga ada penggugat dan Tergugat. Tidak semua dakwaan istri adalah benar dan tidak semua pembelaan suami itu benar, oleh sebab itu perlu kepada perbincangan dan pembuktian. Proses ini dinamakan sebutan. Selesai proses sebutan ini, hakim akan meneliti bidangkuasa. Pertama sekali kita perlu tahu akta, seksyen dan undang-undang keluarga. Selepas sebutan, kita akan pergi pada perbincangan. Jika semua setuju, tiada masalah, hakim akan teruskan mengeluarkan Alasan Penghakiman (A/P) atau Keputusan Penghakiman, kemudian selesai. Tetapi, jika tidak setuju, kita akan melalui proses perbincangan. Pihak penggugat ini akan bawa segala bukti-bukti. Bukti-

²⁶ Tuan Mohd Azlan Bin Mohd Azhar, Ketua Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, *Wawancara*, 8 Februari 2023

²⁷ Tuan Azharizal Bin Arshad, Pegawai Penyelidikan Kanan Ketua Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, *Wawancara*, 15 Februari 2023.

bukti ini adalah dari segi dokumen, saksi dan sebagainya. Hakim akan mengenal pasti ruang-ruang syubhan sebelum membuat penghakiman. Dokumen penting dan juga saksi-saksi yang melihat keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat. Jadi atas kebijakan pihak penggugat untuk memastikan bukti itu ada dan sekaligus membuktikan kemampuan suami membayar nafkah. Seterusnya, hakim juga melihat pada saksi-saksi yang ada sama ada dari segi syahadah, bayyinah atau qarinah. Ada bayyinah yang kitab oleh terima tanpa perlu syahadah tetapi ada juga hakim akan melihat syahadah. Karena adakalanya bayyinah dengan syahadah ini adakalanya kita ragu-ragu lagi jadi kemudian kita akan lihat pula pada qarinah. Berdasarkan kasus-kasus pembuktian itu kurang. Jadi, ia tidak menghilangkan pemberian nafkah itu tapi dari sisi kadar itu sama ada rendah atau tinggi.

Karena itu beliau mengatakan bahwa nafkah ini adalah subjektif. Biasanya, hakim melihat keperluan istri yaitu perbelanjaannya berapa sebulan dan lain-lain yang berkaitan. Keperluan ini ada tiga perkara tetapi hakim yaitu makan minum, tempat tinggal dan pakaian selain dari tiga itu hakim menolak tuntutan tersebut. Jika si ayah masih tetap cuai dari membayar nafkah istri walaupun perintah Mahkamah telah dikeluarkan, pihak penggugat yaitu si istri boleh mengeluarkan tuntutan yang si suami ini telah abai dan cuai dari sisi nafkah zahir dan batin, kemudian lakukan proses saman penghakiman dan akan ada proses-proses lainnya sehingga boleh memohon pada Mahkamah untuk melakukan proses sitaan. Mahkamah akan melihat sekiranya si suami ini tetap tidak memberikan kerjasama malah menghina mahkamah tidak hadir ke mahkamah.

Jika kita lihat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, nafkah ini melihat kepada kemampuan. Kita perlu ingat makna nafkah ini. Asasnya kepada kemampuan dan keperluan. Panduan ini juga berpandukan kepada maqashid syariah. Hakim juga sentiasa merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Kitab-kitab, hukum syarak dan kasusemuanya melihat kepada kemampuan. Nafkah istri ini wajib berdasarkan firman Allah Taala dalam Surat al-Baqarah ayat 233 dan Surat at-Thalak ayat 7. Jika suami ada rasa tanggung jawab, dia akan memenuhi tanggung jawanya sebagai suami memberikan nafkah secukupnya dan tidak cuai atau mnengabaikan istri.

Sumpah (Yamin al-Istizahr) hanya diperlukan sebelah pihak sahaja, suami tak hadir. Ada dua keadaan yaitu ketika satu pihak akan dikenakan dakwa tidak hadir langsung ke mahkamah dan pihak yang mendakwa contoh istri yang mendakwa karena kekurangan bukti. Hujungnya nanti dari segi pertimbangan hakim akan melihat kepada budi bicara hakim tetapi masih melihat kepada pembuktian-pembuktian yang kukuh oleh penggugat dan juga melihat Kerjasama dari pihak Tergugat.

Analisis Putusan Hakim Antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mengenai Alasan Pengabaian Nafkah Dalam Putusan Fasakh.

Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak adalah melihat kepada kerjasama Tergugat terhadap Mahkamah yaitu tempoh masa yang diambil untuk hadir ke Mahkamah bermula dari tanggal saman dan pernyataan tuntutan. Seterusnya, tempoh perbicaraan yang bergantung kepada Tergugat, sama ada Tergugat memberi kerjasama yang baik dan mempercepatkan tempoh perbicaraan atau sengaja melambatkan tempoh perbicaraan. Selain itu, pembuktian. Hakim juga melihat dari dokumentasi dari segi pembuktian surat sakit, mengambil dadah, keterangan butiran, fakta maupun dokumen dengan keterangan yang lebih jelas untuk meyakinkan Mahkamah dan menilai keterangan saksi.

Di samping itu, keperluan dan kemampuan. Taraf kehidupan penggugat dan Tergugat semasa bersama, Mahkamah mengambil pendekatan bahwa sekadar melihat kepada perkara keperluan sahaja boleh diterima sebagai nafkah dan bukan perkara kehendak. Mahkamah melihat semua aspek keperluan istri yaitu makan minum, perbelanjaan bulanan, pakaian dan tempat tinggal, perubatan, dan Seterusnya, kadar nafkah istri yaitu melihat kepada keperluan istri, menimbangkan keadaan pihak-pihak terlibat yaitu anak-anak dan Tergugat, pertimbangan terperinci terhadap tuntutan yang dibuat, dan nafkah zahir dan batin mengikut kualiti kehidupannya. Seterusnya, menggunakan budibicara dalam menentukan kadar yang munasabah dan suai manfaat bagi istri tersebut. Selain tu, suami atau istri boleh membuka fail kasus di mahkamah. Dan dari segi saksi hanya dua orang lelaki sahaja sekiranya tiada saksi lelaki maka diperbolehkan dua orang saksi perempuan. Selain itu tidak diterima oleh hakim.

Manakala, bagi Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula adalah melihat dari segi dakwaan dan tuntutan, yaitu bersumpah (yamin al-istizhar) karena sumpah juga merupakan salah satu kaidah pembuktian di dalam Islam dan untuk menguatkan dakwaan dan ia juga berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Penyata Tuntutan Fasakh juga diperincikan dari bilangan anak, tanggal pernikahan, keperluannya, sebab tuntutan karena kecuaiian atau mengabaikan nafkah zahir dan batin suami kepada istri itu mengeluarkan saraan nafkah serta kemampuan suami untuk alasan pengabaian nafkah yang dituntutnya.

Seterusnya, keterangan dan pengakuan. Jika istri tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan nafkah zahir maupun batin, mengambil kira keterangan dan pengakuan istri tersebut. Keterangan lisan dan iqrar saksi-saksi. Selain itu, sentiasa melihat kepada kemampuan yaitu keperluan istri, melihat kepada "keperluan

dan kehendak”, melihat kadar nafkah yang mampu oleh suami menggunakan sekala kewajaran untuk menetapkan kadar nafkah istri, mengikut taraf kehidupan semua pihak. Selain itu, kebanyakan negeri telah membenarkan permohona fasakh ini oleh suami atau istri tetapi di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Kuala Lumpur masih lagi hanya dibenarkan istri sahaja yang mengfailkan fasakh. Dibawah Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Seksyen 121 Ketidakhadiran pihak-pihak²⁸ yaitu jika salah satu pihak tidak hadir di dalam perbincangan, tidak hadir di sini adalah juga termasuk tidak memberikan kerjasama. Maka, mahkamah boleh membuat keputusan untuk meneruskan kes pendengaran, perbincangan dan memutuskan keputusan berdasarkan peruntukkan Seksyen 121 (1) (b) yaitu:

(1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran:

b. Penggugat tidak hadir, mahkamah boleh tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya.

Di samping itu, rayuan juga menjadi salah satu asas sebelum suatu putusan itu diputuskan. Antaranya adalah alasan-alasan rayuan perayu, pliding dan catatan perbincangan dan penyata pembelaan. Selain itu, keperluan. Keperluan dharuriyyat. Yaitu melibatkan makan minum, pakaian, tempat tinggal. Seterusnya, bidangkuasa. Permohonan yang dalam bidangkuasa sahaja akan diterima dan diteruskan. Mengikut hukum feqah, dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki bersamaan dua orang perempuan. Walaubagaimanapun, secara dasarnya, mahkamah tidak mengambil berat berapa pun orang saksi, asalkan dakwaan dapat disokong dengan keterangan saksi tersebut. Jika mahkamah mendapat saksi atau pemohon kurang membuktikan kasus itu, mahkamah akan minta pemohon membuat sumpah tersebut.

Kemudian faktor perbezaan antara kedua mahkamah berkenaan dengan putusan dan pertimbangan hakim adalah menggunakan budi bicara sepenuhnya dari segi kadar nafkah istri oleh Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak. Menurut hakim Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Perak, putusan yang dikeluarkan dengan menggunakan budi bicara tersebut mengikut kepada tempoh nafkah itu tidak diberikan oleh suami lebih kepada dua bulan dan melihat kepada semua keperluan istri yaitu makan minum, tempat tinggal, perbelanjaan bulanan, perubatan dan pakaian. Dan juga membuka fail kasus ini hanya suami atau istri sahaja. Budi bicara yang digunakan untuk disabitkan fasakh adalah sepenuhnya atas ijtihad hakim selepas meneliti segala butiran dan keperluan suami kepada istri tersebut. Jika dilihat panduan pelaksanaan putusan hakim juga secara jeas menunjukkan bahwa Mahkamah di perak hanya melihat keperluan istri dan beberapa tempoh nafkah yang diberikan

²⁸ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984* (Akta 585 Hingga 22hb Oktober 1998) (Selangor: Golden Books Centre, 2019), h.60

suami dua bulan. Sedangkan sepatutnya diberikan selama tempoh lebih kepada tiga bulan yang ditetapkan mengikut keadaan semasa untuk mengelakkan penyalahgunaan budibicara ini. Apabila tidak ada satu ketetapan yang ditetapkan oleh JKSM, akan ada banyak kasus-kasus rayuan yang dipohon oleh Penggugat maupun Tergugat. Ini akan menyebabkan puca sesuatu kasus fasakh lewat utk dilesaikan dan mengambil masa yang terlalu lama untuk diputuskan.

Sedangkan, hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjelaskan bahwa menggunakan budi bicara adalah jalan kedua setelah memperhatikan dari sebuah keluarga perlukan kaunseling dan khidmat nasihat keluarga yaitu dipanggil sebutan sebelum dibicarakan dihadapan hakim. Jika tidak bersesuaian dan berlaku berpanjangan, barulah akan digunakan budibicara itu. Karena Mahkamah akan melihat pengabaian nafkah ini keperluan asas istri adalah tiga yaitu makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Selain itu, istri sahaja yang boleh mengfailkan kasus fasakh di mahkamah, suami tidak boleh mengfailkan kasus fasakh. Seterusnya, rayuan untuk fasakh ini juga menjadi asas sebelum suatu putusan itu dikeluarkan. Rayuan itu dilihat pada alasan-alasan rayuan perayu, pliding dan catatan perbicaraan dan penyata pembelaan yang mengatakan sekian Tergugat tidak mampu untuk memberi nafkah istri dan tidak mampu tinggal bersama. Tetapi tidak memberikan kerjasama untuk bercerai secara baik. Jadi si istri tidak tahan dan ingin kebahagiaan hidupnya malah dia mengambil keputusan untuk memohon fasakh. Seperti dalam kasus Syaira Dalina Binti Abdullah lwn Suflan Faidzl Bin Arshad.

Setelah memperhatikan argumentasi kedua Mahkamah yang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat putusan dan pertimbangan yang berbeda dalam pengabaian nafkah ini seperti dijelaskan yaitu budibicara, pembuktian, saksi-saksi, keterangan lisan serta bertulis dan tempoh kadar nafkah istri. Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa mengikut konteks kekinian, pandangan dan putusan hakim dari Hakim Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Perak dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur keduanya adalah relevan dan masih berdasarkan kehakiman syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan juga mengikut kepada ijtihad dan kebijakan hakim.

Dan yang terakhir, secara umumnya alasan pengabaian nafkah dalam putusan fasakh ini juga adalah untuk menjaga kebajikan istri, kebahagiaan istri dengan tidak menyusahkan istri dalam sebuah pernikahan. Kepentingan nafkah istri ini juga adalah menjaga kelima-lima kepentingan manusia yaitu nyawa, akal, agama, harta dan keturunan. Seorang suami yang sayang pada istrinya sepatutnya lebih tahu akan tanggungjawab dan kewajiban seorang suami itu dalam memberi nafkah bukan membiarkan dan meninggal istri itu sendirian atau melepaskan beban dan tanggungjawab pada istri sahaja. Berikanlah hak-hak kepada yang berhak,

tunaikanlah. Pernikahan juga bertujuan suami istri sama-sama merasa kebahagiaan dan merasa nikmat pernikahan ini bersama istri bukanlah alat untuk memuaskan kehendak suami sahaja tetapi suami istri adalah dua insan yang dijadikan Allah untuk sama-sama menikmati kehidupan berkeluarga.

KESIMPULAN

Pertimbangan pelaksanaan putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah melihat kemampuan suami dan keperluan istri dalam tempoh perkahwinan, melihat tempoh nafkah, melihat suami mengambil dadah atau sakit dan sebagainya, melihat kepada suami memberi kerjasama hadir ke mahkamah, menilai keterangan saksi-saksi, menilai setiap kasus melalui proses perbicaraan, mengenal pasti ruang-ruang syubhah sebelum membuat penghakiman seperti bukti-bukti dari segi dokumen, saksi dan sebagainya. Selain itu, merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Kitab-kitab dan hukum syarak dan berpandukan kepada maqashid syariah.

Setelah memperhatikan argumentasi kedua mahkamah Setelah memperhatikan argumentasi kedua Mahkamah yang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat putusan dan pertimbangan yang berbeda dalam nafkah istri ini seperti yang telah dijelaskan yaitu budibicara, rayuan dan kadar nafkah istri. Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa mengikut konteks kekinian, pandangan dan putusan hakim dari Hakim Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Perak dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur keduanya adalah relevan dan masih berdasarkan kehakiman syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan juga mengikut kepada ijihad dan kebijakan hakim. Dan yang terakhir, secara umumnya alasan pengabaian nafkah dalam putusan fasakh ini juga adalah untuk menjaga kebajikan istri, kebahagiaan istri dengan tidak menyusahkan istri dalam sebuah pernikahan.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004)
- Bahiyah Ahmad, Raihanah Azahari dan Asmak Ab Rahman, "Kriteria Kifayah Dan Ma'Ruf Nafkah IstriDan Anak: Kajian Pelaksanaan Semasa Di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Jil.21, Bil. 3, 2013, h.313
- Dato' Haji Daud Bin Muhammad (Dato' Aria DiRaja) Ketua Hakim Syarie Kelantan, "Penulisan Alasan Penghakiman" <http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/downloadjksnk/Alasanpenghakiman.pdf>, diakses pada 23 November 2022 jam 20:12 WIB.

- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, Kasus No. 014-0018-2022
- Enakmen Keluarga Islam Perak 2004, Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, *Portal E-Syariah*, 2004
- Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, “Bab Kewajiban Nafkah ke atas keluarga dan Kanak-kanak”, https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=9778&idto=9780&bk_no=52&ID=2987, diakses pada 25 November 2022 jam 21:34 WIB.
- Grup Buku Karangkrif, Alquran Dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Selangor: Karya Bestari, 2014) h.87.
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019) (Selangor: Golden Books Centre, 2019)
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam*
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*, (Akta 303 Hingga 22hb Oktober 1998) (Selangor: Golden Books Centre, 2019)
- Mahkamah Agung-RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011)
- Portal Rasmi E-Syariah, Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Bahagian XVII – Pendengaran”
- SA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, “Hukum Pernikahan Islam”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 4 Mazhab Juzuk 4,5* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2017)
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Tuan Azharizal Bin Arshad , Pegawai Penyelidikan Kanan Ketua Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, *Wawancara*, 15 Februari 2023.

Tuan Mohd Azlan Bin Mohd Azhar, Ketua Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah
Seri Iskandar, Perak, *Wawancara*, 8 Februari 2023

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an Dan
Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Offset, 2011)